

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang multikulturalisme, bahkan istilah ini dikenal bukan hanya di kalangan masyarakat Indonesia saja, negara lain pun mengakui bahwa Indonesia merupakan negara multikulturalisme. Kata kulturalisme berasal dari kata *multi* (plural) dan *cultural* (budaya), multikulturalisme merujuk pada pengakuan terhadap realitas keagamaan Kultural, yang berarti mengisyaratkan sebuah keberagaman tradisonal seperti keberagaman agama, suku dan ras. Selain itu di dalamnya mencakup keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur yang akan bermunculan di setiap tahapan kehidupan masyarakat.

Multikulturalisme secara umum sangat diterima oleh masyarakat di Indonesia, tentunya ini semua ada dan berkaitan dengan realitas masyarakat Indonesia yang beragam. Keberagaman masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut : tersebar di berbagai kepulauan dengan jumlah kepulauan 13.667 pulau meskipun tidak semua pulau di Indonesia berpenghuni, masyarakat Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang jumlahnya 358 suku bangsa, dan 200 sub suku bangsa, memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang memiliki jumlah 87,2% beragama islam, 9% beragama Kristen dan katolik, 1,7% Bergama hindu, 0,7% dan 0,5% budha dan konghucu (indonesia.go.id, 2018) dan histori kultur percampuran dari berbagai

macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan berbagai kultur barat yang modern.

Sebagai negara yang multikulturalisme tentunya sudah menjadi tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang teramanatkan dalam naskah UUD 1945 dan Pancasila. Dalam negara yang multikulturalisme tentunya riskan memiliki kerawanan dalam perpecahan. Dalam menjaga Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah membuat berbagai Undang Undang dan aturan yang melindungi dan mengantisipasi perpecahan di negara Indonesia yang bersumber dari perbedaan budaya, suku, agama, ras dan permasalahan tersebut yang sering kita dengar istilahnya yaitu diskriminatif.

Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari berbagai perlakuan yang diskriminatif sebagai hak dari konstitusional yang dimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktiknya masih sangat banyak dan masih dijumpai adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan (Hesti, A. 2015 : 493). Sebetulnya berbagai gerakan-gerakan yang menentang diskriminasi terus dilakukan baik secara sistematis dan terus menerus. Pada prinsipnya gerakan ini menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari diskriminatif. Dalam istilah hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia.

Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) sebagai berikut :

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”

Dalam hal tersebut dapat dipahami mengenai prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dengan pemahaman lain hal ini berarti dalam kehidupan individu dan kehidupan sosial setiap orang memiliki kedudukan yang setara satu dengan yang lainnya (Hesti, A. 2015 : 494). Pasal 2 dalam prinsip Anti radikalisme sebagai yang telah ditentukan dalam *Universal Declaration of Human Right*, secara tegas menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang telah diatur dalam deklarasi tanpa adanya pengecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan cara pandang lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Dengan bahasa lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh perlakuan-perlakuan diskriminatif yang ditujukan atau diarahkan kepada suatu kelompok masyarakat tertentu (Hesti, A. 2015 : 494).

Negara Indonesia juga memiliki ketegasan mengenai prinsip kesetaraan dan diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia yang telah di ratifikasi dari *The Internasional Covenant on Economic, Social and Culture Right*, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Republik Indonesia, 2005).

Uraian-uraian di atas yang menegaskan mengenai prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan anti diskriminatif sebagai prinsip dari hak asasi manusia, hal ini bila mana terjadi atau menunjukkan segala bentuk tindakan/perlakuan diskriminatif merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menyinggung kembali pada persoalan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beberapa bulan lalu dihadapkan oleh konflik. Konflik tersebut adalah diskriminatif rasial yang terjadi di pulau Jawa tepatnya di Kota Malang dan Surabaya. Tentu saja ini terjadi akibat adanya provokator ataupun oknum-oknum yang menjadi pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut, terlebih diskriminasi ini terjadi dilakukan oleh instansi, organisasi masyarakat kepada salah satu kelompok mahasiswa yang sedang menimba Ilmu di Malang dan Surabaya.

Permasalahan diskriminasi rasial ini berawal dari aksi yang dilakukan mahasiswa asal Papua. Para Mahasiswa Papua yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Malang sebetulnya akan melakukan aksi damai di balai Kota Malang, mereka sebetulnya mengecam penandatanganan Agreement antara Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962. Bermula dari pertemuan mahasiswa dengan sekelompok warga Kota Malang di Rajabali yang kemudian terjadi perselisihan dan adu mulut. Perselisihan ini terjadi dan berlanjut dengan bentrok fisik. Kejadian tersebut juga membuat masyarakat yang tinggal di dekat kawasan Rajabali keluar dan menyaksikan bentrokan hingga terlibat didalamnya (m.cnnindonesia.com,19 Agustus 2019).

Sebetulnya mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang itu hanya melakukan aksi damai, mereka hanya memperingati perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Ini merupakan tahap internasional perdana yang dianggap oleh orang Papua sebagai pintu masuk Papua bergabung dengan Indonesia pada 1969. Menurut peneliti dari *Institute for Criminal Justice Reform* menjelaskan bahwa tuntutan hak menentukan nasib sendiri tidak termasuk dalam makar. Musabab-nya, prinsip hukum pidana. Namun demikian aparat maupun ormas di Indonesia mengabaikan hukum internasional tersebut, yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Dan ia terikat dalam kovenan hak-hak sipil dan politik yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No.12 Tahun 2005 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2005). Perilaku represif terhadap mahasiswa Papua masih terus dirasakan hingga saat ini. Salah satu yang masih teringat jelas dalam memori warga Papua adalah kasus Wasior Wamena pada masa reformasi.

Selanjutnya, masalah kegagalan pembangunan di Papua telah memicu amarah besar di Bumi Cenderawasih, menurut catatan LIPI, kondisi kemiskinan warga Papua kian meningkat dan indeks Pembangunan Manusia semakin rendah, terutama di wilayah kabupaten atau kota dengan mayoritas penduduk Papua. Kemudian masalah terakhir yang memicu tindakan rasial dan konflik yang berkepanjangan di tanah Papua yang melibatkan warga Papua dan Mahasiswa Papua adalah masalah status politik dan sejarah masuknya Papua ke Indonesia yang sebagaimana di sebutkan di atas, yang ada kecenderungan selama ini di tutup tutupi oleh pemerintah. Selain

permasalahan tersebut sebetulnya pemicu awal dari suatu tindakan diskriminasi adalah terbentuknya stigma-stigma negatif yang selama ini diterima oleh mahasiswa ataupun pelajar asal Papua. Mereka dianggap sebagai seseorang yang "kasar", "suka mabuk", dan "tukang buat onar". Sebagaimana dikuti didalam merdeka.com pada tanggal 23 Agustus 2019, ada kalimat yang tertulis seperti :

"Kenapa orang Papua kasar, Pemabuk dan tukang onar"

Pertanyaan ini sering diterima oleh salah satu narasumber dari merdeka.com yaitu Ricky Cuan. Bagi dirinya terdengar kalimat itu merupakan sesuatu yang terdengar merendahkan. Bukan hanya saja ucapan. Terkadang mahasiswa Papua sering dijauhi karena perawakan dianggap menyeramkan. Selain itu mereka terkadang diberi sambutan kurang menyenangkan. Semua ini terjadi karena dialek dan cara bertutur kata mereka tak seperti orang kebanyakan. Ditambah tata bahasa tak beraturan. Meskipun terkadang hal yang dinilai merendahkan ini disampaikan dengan lewat nada candaan saja. Namun tetap saja hal tersebut dianggap merendahkan mereka.

Permasalahan-permasalahan di atas inilah yang menyebabkan kerusuhan di Kota Papua dan Papua Barat. Permasalahan Diskriminasi Rasial dan permasalahan stigma terhadap mahasiswa asal Papua di pulau jawa tidak pernah bisa di kendalikan oleh pemerintah Indonesia yang berpusat di Jakarta. Pada tanggal 19 Agustus tepatnya setelah Indonesia merayakan Kemerdekaannya yang ke 74, gelombang masa

yang berasal dari tanah Papua menumpahkan kekecewaannya di Jaya Pura, ibu kota Papua, dan di Manokwari, ibu kota Papua Barat, serta Kota Sorong. *United Liberations Movement for West Papua* (ULMWP), ini merupakan organisasi payung untuk gerakan politik kemerdekaan Papua. Mereka mencatat penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian sebanyak 226 mahasiswa Papua pada demo 14 – 18 Agustus 2019. Lokasi demo di Jayapura, Maluku, Surabaya, dan Malang (m.merdeka.com, 19 Agustus 2019) .

Berangkat dari permasalahan diskriminasi yang didasarkan oleh stigma terhadap warga Papua khususnya mereka yang berstatus mahasiswa di berbagai kota dan Provinsi khususnya di Kota Malang, yang dimana di dalamnya membutuhkan penyelesaian permasalahan, diantaranya permasalahan stigma negatif dan diskriminasi rasial, yang selama ini diberikan masyarakat sekitar kepada mahasiswa Papua. Bilamana penyelesaian permasalahan ini tidak cepat dilakukan baik oleh pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait maka ditakutkan permasalahan ini menjadi berlarut dan terus akan tumbuh stigma negates lalu terjadi diskriminasi rasial terhadap mahasiswa-mahasiswa asal Papua di seluruh Indonesia, dan ini merupakan sikap dan tindakan yang melanggar Undang-Undang, hak asasi manusia, dan menghilangkan nilai-nilai pluralisme di Indonesia. Melihat permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ ***Tribal Stigma Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Kota Malang***” agar dimana dari hasil penelitian ini peneliti menyumbangkan hasil data yang dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai *Tribal Stigma*.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk *Tribal Stigma* yang selama ini dialami oleh mahasiswa Papua ?
2. Bagaimana mahasiswa Papua dalam menghadapi *Tribal Stigma* di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bentuk *Tribal Stigma* yang selama ini didapat oleh mahasiswa Papua.
2. Untuk mengetahui mahasiswa Papua dalam menghadapi *Tribal Stigma* di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, peneliti diharapkan memberikan nilai kegunaan akademis dan nilai praktis, yaitu :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep *Tribal Stigma* (Erving Goffman).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan acuan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai tema yang berkaitan dengan stigma.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa pendatang khususnya mereka yang berasal dari Papua yang tinggal di perantauan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi di saat sekarang.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang terfokus pada kualitas (*Quality*). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik; 1), berlangsung dalam alamiah. 2), tidak secara apriori mengharuskan adanya teori. 3), peneliti adalah instrument utama penelitian dalam pengumpulan data. 4), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dalam hal kata-kata. 5), fokus diarahkan pada persepsi dan pengalaman partisipan. 6), proses sama pentingnya dengan produk, perhatian peneliti diarahkan kepada pemahaman bagaimana berlangsungnya kejadian. (7), penafsiran dalam

pemahaman ideografi, bukan kepada membuat generalisasi. (8), memunculkan desain, peneliti mencoba merekonstruksikan penafsiran dan pemahaman dengan sumber data manusia. (9), data tidak dapat di kuantifikasi. (10), objektivitas dan kebenaran dijunjung tinggi, derajat keterpercayaan didapat melalui verifikasi berdasar koherensi, wawasan dan manfaat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus sesuai dengan yang disampaikan oleh Robert K Yin (2008). Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian yang terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu.

Studi kasus menurut Yin (2008:18) adalah suatu *inquiry* empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antar fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana: multi sumber bukti dimanfaatkan. Sebagai suatu *inquiry* studi kasus tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak pula harus tergantung pada data etnografi atau observasi partisipan. Bahkan menurut

Yin seorang peneliti bisa saja melakukan studi kasus yang valid dan berkualitas tinggi tanpa meninggalkan kepustakaan, tergantung pada topik yang akan diselidiki.

Studi kasus memiliki keunggulan dalam hal memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel, memperoleh wawasan mengenai konsep dasar perilaku manusia dan menyajikan data temuan yang sangat berguna untuk membangun latar permasalahan. Kelebihan lainnya yaitu mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Selain itu metode studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual, tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif.

Untuk melakukan studi kasus Robert K Yin, menganjurkan kasus yang diangkat signifikan mengisyaratkan sebuah keunikan dan betul-betul khas. Selain itu studi kasus harus lengkap dengan ciri-ciri memiliki batas yang jelas, tersedia bukti yang relevan dan mempermasalahkan ketiadaan kondisi buatan, mempertimbangkan alternative perspektif (anomaly), menampilkan bukti yang memadai dan laporan harus ditulis

dengan cara menarik dan menggugah. Dalam penelitian ini keunikan kasus mencakup: (1), ciri khas dari *Tribal Stigma* (2), latar belakang *Tribal Stigma* terbentuk ; (3), konteks *Tribal Stigma* ; (4), mencakup budaya; (5), kasus-kasus lain yang dengannya suatu kasus *Tribal Stigma* dapat dikenali; (6), para informan yang menjadi sumber mengetahui mengenai kasus *Tribal Stigma*.

Selanjutnya menurut Yin (2008:29), menyarankan lima komponen penting dalam mendesain studi , dalam penelitian ini memiliki lima komponen penting, yaitu: (1), pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kasus triba stigma, (2), proporsi penelitian mengenai *Tribal Stigma*, hal yang harus diteliti seputar bentuk *Tribal Stigma* yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, (3), unit analisis penelitian ini bersifat meso karena merupakan kelompok dari mahasiswa asal Papua, (4), Membuat kriteria untuk menentukan informan, agar peneliti tidak tergoda untuk mencari data yang tidak diperlukan. dan (5), kriteria menginterpretasi temuan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang *Tribal Stigma* terhadap mahasiswa asal Papua. Hal ini karena mengikat fokus penelitian terhadap

Tribal Stigma terhadap mahasiswa asal Papua yang secara unik fenomena ini jarang terjadi pada mahasiswa pendatang lainnya.

Dengan demikian penelitian tentang “*Tribal Stigma Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Kota Malang*” memfokuskan penelitian dengan metode studi kasus, mengingat *Tribal Stigma* merupakan fenomena yang hanya terjadi terhadap mahasiswa pendatang.

3. Unit Analisis

Unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan “kasus” atau fenomena dalam penelitian yang bersangkutan. Dalam studi kasus, fenomena mungkin bisa berkenaan dengan individu. Individu tersebut merupakan unit analisis primernya. Setiap individu yang relevan dikumpulkan,...proposisi juga diperlukan guna membantu pengidentifikasian informasi yang relevan tentang individu atau beberapa individu (kelompok). Tanpa proposisi, peneliti akan mudah tergoda untuk mengumpulkan segala sesuatu yang tidak mungkin atau tidak diperlukan (K. Yin: 30-31), oleh karena itu peneliti telah membuat kriteria dalam menentukan informan dan ketika melakukan wawancara peneliti menggali informasi data yang hanya berkaitan dengan bentuk *Tribal Stigma* yang selama ini didapatkan oleh mahasiswa asal Papua sehingga data yang tidak diperlukan dapat dihindari.

Sebagaimana telah diuraikan diatas analisis primernya adalah mahasiswa asal Papua yang berada di Kota Malang, dan yang termasuk proposisi nya adalah bagaimana bentuk *Tribal Stigma* yang selama ini terjadi terhadap mahasiswa asal Papua, dan bagaimana mahasiswa Papua menghadapi *Tribal Stigma*. Unit analisis dalam penelitian ini bersifat *meso*. Karena penelitian ini terfokus pada fenomena *Tribal Stigma* terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Malang.

4. Lokasi Penelitian

Menurut Lincoln dan Guba (1985:193-194) mengemukakan karakteristik yang secara unik menentukan manusia sebagai instrument pilihan bagi penelitian naturalistik yaitu: “*responsiveness, adaptability, holistic emphasis, knowledge base expansion, processual immediacy, opportunities for clarification and summarization and opportunity to explore atypical or idiosyncratic responses.*” Manusia sebagai instrument bisa merasakan dan merespon semua petunjuk pribadi dan lingkungan yang muncul. Dengan kemampuan tersebut peneliti bisa berinteraksi dengan situasi untuk merasakan reaksinya dan membuatnya menjadi jelas. Ketika bertemu dengan informan, peneliti melakukan wawancara dan berdiskusi dengan mahasiswa asal Papua dengan bertatap muka langsung, sesi wawancara ini dilakukan di dua tempat yaitu di café dan asrama, yang

peneliti lakukan adalah mendengarkan berbagai kronologi, sejarah dari setiap permasalahan stigma yang terjadi.

Sebagaimana uraian diatas dalam penelitian ini dilakukan atas respons dari lingkungan sekitar dan dalam penelitian kualitatif penelitian tidak sebatas lokasi penelitian tetapi merupakan suasana lingkungan penelitian yang memungkinkan terjadinya interaksi subjek penelitian untuk memecahkan masalah. Penelitian yang terdiri dari manusia, masyarakat, lembaga di mana berkaitan peristiwa yang melahirkan kasus tertentu.

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Malang karena Kota Malang merupakan kota pendidikan. Selain itu lokasi penelitian dilakukan di Kampus, Café, kesekretariatan organisasi mahasiswa, dan tempat lainnya yang berada di Kota Malang. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan subjek harus merupakan mahasiswa asal Papua, dan lokasi yang dipilih bergantung pada kesediaan subjek dalam menentukan wawancara.

5. Teknik Penentuan Subjek

Teknik penentuan subjek atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikanto (2006 : 145) subjek penelitian

adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2007 : 301) mengemukakan bahwa :

“Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistic) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). penentuan sampel tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk di generalisasikan”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Djamar'an Satori (2007 : 6) merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Djamar'an Satori (2007 : 6) menambahkan bahwa *purposive sampling* sering disebut juga sebagai *judgement sampling*, secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu”. Ciri-ciri penentuan subjek dengan prinsip *purposive* yaitu :

1) *Adjustment emergent sampling design/ sementara*

- 2) *serial selection of sample units/menggelinding seperti bola salju (snow ball)*
- 3) *Continuous of focusing of the sample/disesuaikan dengan kebutuhan*
- 4) *Selection to the point of redundancy/dipilih sampai jenuh*

Jadi, pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bebas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang *Tribal Stigma* terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Malang. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bahwa pernah terjadi konflik di Kota Malang
2. Pernah terjadi stigma dan berujung diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Malang
3. Mahasiswa Aktif di perguruan tinggi Kota Malang
4. Mahasiswa asal Papua
5. Bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Malang

6. Pernah mengalami *Tribal Stigma*

7. Berjumlah lima orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Yin (2008:103) pengumpulan data untuk studi kasus berupa dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi dan perangkat fisik. Untuk itu prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, Observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara studi kasus bertipe *open-ended*,

Wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, Dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa yang ada (K. Yin : 108). Di dalam penelitian ini wawancara dipisahkan dari kegiatan penelitian yang bersifat formal. Tapi menjelang-menjelang akhir studi, ketika ada informasi yang perlu di kroscek, peneliti dapat mengatur waktu secara khusus dengan subjek untuk mengadakan wawancara yang lebih formal.

Wawancara bertipe *open-ended* akan dilakukan kepada mahasiswa asal Papua yang pernah mengalami *Tribal Stigma*. Dalam penelitian ini memakai pertanyaan terbuka secara informal interview yang ditujukan mengeksplorasi mengenai *Tribal Stigma* terhadap mahasiswa asal Papua, melalui :

1. Perencanaan pelaksanaan, yaitu persiapan wawancara dengan menghubungi subjek untuk menentukan lokasi dan waktu wawancara.
2. Pelaksanaan yang direncanakan, yaitu menggali dan menemukan data tentang *Tribal Stigma* terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Malang yang dilakukan dengan melakukan diskusi di dua tempat yaitu di café dan asrama.
3. Mengevaluasi kondisi dan masalah yang disampaikan subjek mengenai *Tribal Stigma* dengan melakukan wawancara dengan salah satu informan kunci.
4. Perbaikan, yaitu mengembalikan hasil wawancara melalui evaluasi editing, memperbarui, dan memperbaiki hasil dari temuan dan bimbingan dengan dosen pembimbing agar data yang didapatkan sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian studi kasus adalah observasi langsung. Observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan terhadap lokasi penelitian dan menciptakan kesempatan untuk observasi secara langsung (K. Yin : 112). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi lokasi kampus, café, tempat tinggal dan kesekretariatan organisasi mahasiswa asal Papua di Kota Malang.

Selain itu observasi secara deskriptif, untuk memperoleh gambaran secara umum subjek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa menggunakan berbagai bentuk dari tipe informasi dan hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit (K. Yin : 112). Dalam penelitian ini dokumentasi berupa :

1. Surat izin penelitian
2. Agenda pertemuan melalui aplikasi *Whatsapp*,
3. Dokumen administrasi seperti proposal skripsi, dokumen-dokumen foto dan rekaman suara
4. Penelitian-penelitian terdahulu untuk menambah referensi penelitian.
5. Berita baru dan artikel-artikel lain yang muncul di media masa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan mahasiswa Papua.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, Huberman dan

Saldana 2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:10), reduksi data adalah proses memilih, fokus, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dalam tulisan catatan lapangan atau transkripsi. Reduksi data terjadi terus-menerus sepanjang penelitian.

Sebagai hasil pengumpulan data, reduksi data terjadi (menulis, ringkasan, koding, membuat *cluster*, membuat partisi, menulis memo). Pengurangan data/proses yang tidak terpakai berlanjut selama di lapangan, sampai laporan akhir selesai. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Tetapi tahap ini adalah bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga akhir kesimpulan yang bisa ditarik dan di verifikasi. Dalam tahap ini, data kualitatif dapat dikurangi dan diubah dalam berbagai cara; melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, melalui yang dimasukkan dalam pola yang lebih besar, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:10) display data adalah perakitan, pengorganisasian atau kompresi informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Display data dapat membantu untuk memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada pemahaman.

Kecenderungan kognitif manusia adalah untuk mengurangi informasi yang kompleks menjadi ringkas, selektif dan disederhanakan atau konfigurasi mudah dipahami. Pemahaman bisa dilakukan melalui pemilihan data yang tidak diperlukan atau tidak dipertanyakan. Display data bisa meliputi berbagai jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Dalam analisis data, display data memiliki tiga fungsi yaitu; mereduksi data dari yang kompleks menjadi yang sederhana, menyimpulkan interpretasi peneliti terhadap data dan menyajikan data sehingga tampil menyeluruh (Alwasilah.2011:120).

3. Kesimpulan

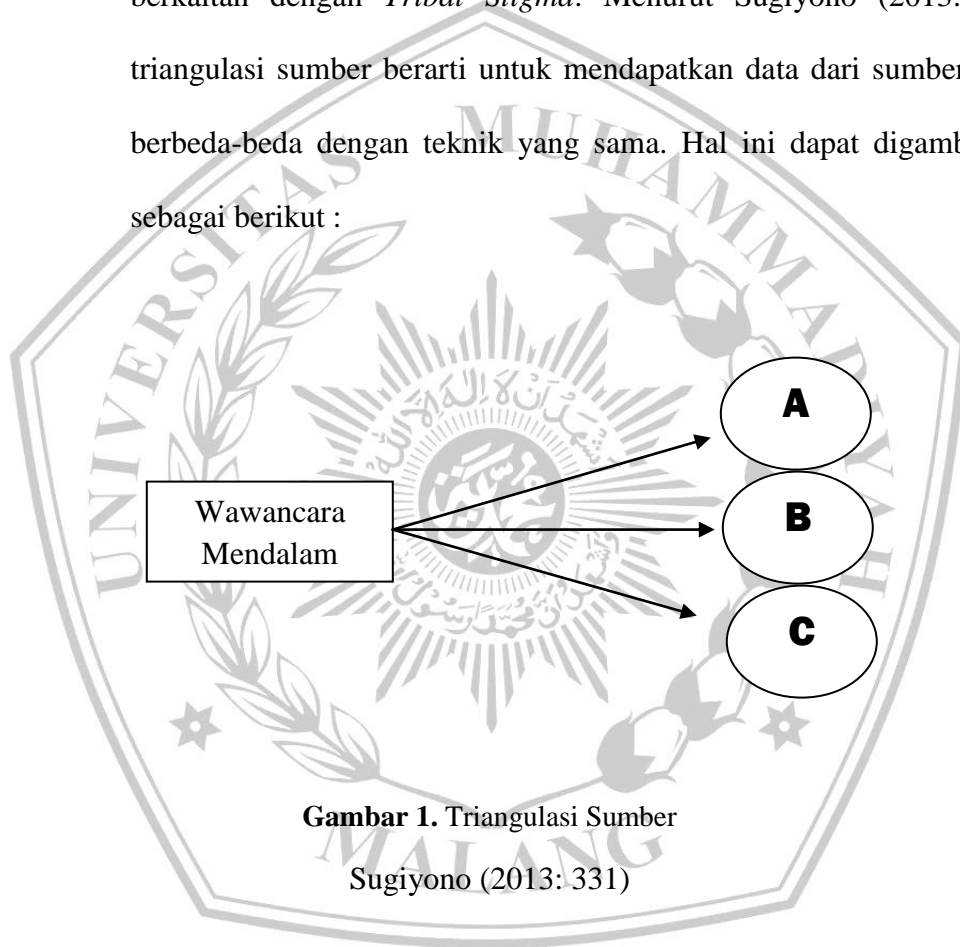
Tahap ketiga kegiatan analisis adalah kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif memiliki keteraturan pola, penjelasan, konfigurasi dan sebab akibat. Peneliti kompeten memegang kesimpulan ringan, menjaga keterbukaan, tetapi pada tahap ini kesimpulan belum lengkap dan jelas, kemudian semakin eksplisit dan membumi, dan kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan

data selesai, tergantung pada ukuran catatan lapangan, koding. Kesimpulan juga di verifikasi sebagai hasil analisis. Sedangkan verifikasi bisa dilakukan secara singkat dengan perjalanan singkat kembali ke catatan lapangan, atau mungkin secara menyeluruh atau dengan upaya maksimal untuk me replikasi temuan dalam satu set data. Makna yang muncul dari data harus diuji sehingga masuk akal. Kegiatan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi, display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus menerus, untuk kemudian didokumentasikan dengan baik sebagai bahan acuan untuk memahami lebih jelas tentang apa yang terjadi. Ketepatan dan kedalaman hasil penelitian akan sangat tergantung kepada teknik analisis yang digunakan dan kemampuan menganalisis seorang peneliti. Analisis data sebagaimana diilustrasikan berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan ketika proses penelitian berlangsung (on-going process) dan berulang-ulang (cyclical) untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh temuan penelitian hingga berakhirnya kegiatan penelitian yang selanjutnya akan disusun dari hasil penelitian ini.

4. Validatas Data

a. Triangulasi Sumber

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, karena dalam melakukan wawancara melibatkan lima sumber data yang berbeda-beda namun peneliti tetap melakukan wawancara mendalam yang berkaitan dengan *Tribal Stigma*. Menurut Sugiyono (2013: 331) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Triangulasi Sumber
Sugiyono (2013: 331)